

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan perkotaan menjadi pusat utama perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan kota ditandai dengan adanya peningkatan penduduk, mata pencaharian yang didominasi oleh kegiatan non pertanian serta perubahan fisik seperti semakin meningkatnya kawasan lahan terbangun. Pada tahun 2025 diprediksi bahwa sebesar 68% penduduk akan tinggal di kota (Buletin Penataan Ruang, 2014). Peningkatan jumlah penduduk ini tidak dapat dihindari karena masyarakat berupaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan bertempat tinggal di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan dipandang sebagai kawasan yang memberikan sarana dan prasarana yang baik serta dianggap memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, peningkatan penduduk di kawasan perkotaan ini juga memiliki berbagai dampak negatif terhadap kehidupan kota. Dampak yang paling dirasakan yakni munculnya berbagai masalah lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas masyarakat sehari-hari.

Masalah lingkungan yang paling banyak terjadi di kota-kota Indonesia adalah masalah penumpukan sampah. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, dan Bandung memiliki permasalahan pengelolaan sampah yang sangat krusial. Jakarta sebagai ibukota Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai kota megapolitan ini masih mengandalkan upaya kerjasama pembagian lahan dalam pengelolaan sampah dengan wilayah lain yaitu Bekasi (Adityo, 2015). Berbagai permasalahan yang kemudian muncul di antara keduanya yakni terkait dengan rute pengangkutan, jam operasional, bahkan daya tampung TPA yang sudah melebihi kapasitas. Permasalahan penumpukan sampah juga terjadi di Kota Bandung. Tragedi longsornya sampah di TPA Leuwigajah pada tahun 2005 silam menjadikan masalah terparah yang pernah terjadi sepanjang pengelolaan sampah di Indonesia (Nugraha, 2011). Longsornya sampah di TPA Leuwigajah akibat ledakan gas metana dalam tumpukan sampah ini memakan korban yang meninggal dunia sejumlah 157 jiwa dan dua buah desa dinyatakan hilang akibat tertimbun longsor sampah tersebut (Setyaningrum, 2005).

Masalah pengelolaan sampah tidak hanya muncul di kota-kota besar namun juga sudah mulai meluas ke kawasan kota-kota kecil. Kota Batam merupakan salah satu kota kecil yang semakin berkembang di Provinsi Kepulauan Riau saat ini juga memiliki permasalahan penumpukan sampah. Volume sampah yang dihasilkan di Kota Batam setiap harinya mencapai

800 ton sementara yang diangkut hanya sekitar 450 ton (Suminar, 2015). Pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak ketiga dengan perjanjian pengangkutan sampah dari rumah tangga menggunakan perhitungan sampah atau tonisasi yang dimulai sejak tahun 2014. Volume sampah yang dihasilkan masyarakat ini terus meningkat. Pihak ketiga akhirnya memperhitungkan kembali jumlah sampah yang diangkut namun ternyata dianggap telah melebihi kapasitas pengangkutan sesuai perjanjian yang ditetapkan. Akibatnya, sampah rumah tangga menumpuk hingga dua minggu lamanya karena pihak ketiga enggan mengangkut sampah tersebut. Permasalahan sampah juga terjadi di Kabupaten Klaten hingga muncul istilah “Klaten Darurat Sampah” karena penumpukan sampah terjadi di berbagai tempat (Purenda, 2016). Pengelolaan sampah secara konvensional yang pada umumnya masih digunakan yaitu dibuang ke TPA, namun TPA yang terdapat di Kabupaten Klaten saat ini menggunakan TPA sementara yang berada di Desa Jogoprayan, Kecamatan Gantiwarno. TPA ini erap kali mendapat penolakan dari masyarakat (Purenda, 2016). Masyarakat menolak lokasi di sekitar permukimannya dijadikan sebagai TPA. Namun pemerintah juga masih terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk pengelolaan yang lebih baik kedepannya karena hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Klaten tidak bersedia untuk menyetujui lokasi pembangunan TPA di sekitar permukiman.

Permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di kota kecil lainnya yang sangat unik yakni terdapat di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Secara administrasi, Kecamatan Colomadu berbatasan langsung dengan Kota Surakarta di bagian timur. Kondisi tersebut mempengaruhi Kecamatan Colomadu sehingga muncul sifat perkotaan yang ditandai dengan adanya fasilitas yang beragam dan pengembangan kawasan perumahan baru. Sementara itu, Kecamatan Colomadu berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali di bagian utara dan barat, serta Kabupaten Sukoharjo di bagian selatan. Kecamatan Colomadu juga disebut sebagai wilayah eksklaf karena secara geografis berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar yang dipisahkan oleh Kota Surakarta (secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1).

Kedudukan eksklaf Kecamatan Colomadu yang unik ini menjadi salah satu penyebab utama yang berdampak pada penumpukan sampah. TPA Sukosari yang menjadi sistem pengolahan akhir sampah di Kabupaten Karanganyar berada cukup jauh dari Kecamatan Colomadu dengan jarak ke lokasi mencapai 30 km (Buku Putih Karanganyar, 2012). Jarak antara TPA dan Kecamatan Colomadu ini mempengaruhi biaya pengangkutan sampah karena menjadi lebih mahal. Hal itu juga berimbas pada jadwal pengambilan sampah yang tidak teratur karena lokasi yang terlalu jauh. Selain itu, rute pengangkutan sampah di Kecamatan Colomadu juga melalui batas administratif wilayah lain di bagian timur yakni melalui Kota Surakarta.

Dampak dari rute pengangkutan sampah tersebut juga dapat memicu permasalahan/konflik antar daerah karena seharusnya rute pengangkutan sampah tidak diperbolehkan melalui kawasan kota. Sehingga akhirnya muncul lokasi-lokasi penumpukan sampah yang dilakukan masyarakat di sembarang tempat seperti di pinggir jalan utama, di lahan kosong, hingga di pinggir sungai.

Berbagai masalah yang telah dijabarkan tersebut telah memperlihatkan akibat dari pengelolaan sampah yang tidak optimal. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 44 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan pembuangan terbuka paling lama lima tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini”. Menurut Buku Putih Sanitasi Karanganyar (2012), TPA Sukosari yang berada di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar masih menggunakan sistem terbuka (*open dumping*). TPA dengan proses pengelolaan sistem terbuka sudah seharusnya diperbarui dengan menggunakan sistem baru yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Selain itu, untuk mengurangi jumlah penumpukan sampah yang berada di TPA, maka sudah seharusnya dilakukan pengurangan sampah sejak dari hulu yakni dari rumah tangga. Namun, perlu adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah karena sampah seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang bernilai (*waste to resource*).

Pengelolaan sampah yang dimulai dari lingkup rumah tangga menjadi suatu strategi yang penting dalam menyelesaikan masalah sampah di Kecamatan Colomadu. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat (PSBM). Pengelolaan ini dianggap mampu memberikan andil dan tanggungjawab yang besar untuk masyarakat agar mampu mengelola sampah secara mandiri karena pada dasarnya sampah merupakan hasil dari berbagai aktivitas masyarakat dan sudah seharusnya masyarakat juga bertanggungjawab untuk mengelola sampah tersebut. Kedudukan eksklaf Kecamatan Colomadu memberikan suatu peluang untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini agar mampu mendorong kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah dan tidak hanya bergantung pada pemerintah yang memberikan fasilitas pengangkutan sampah menuju ke TPA.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak terlepas dari adanya peran-peran berbagai pihak yang berkaitan dengan proses pengelolaan yang diharapkan. Dalam mendorong kepedulian masyarakat dan pengetahuannya dalam pengelolaan sampah, maka dibutuhkan strategi yang tepat dalam aspek kelembagaan. Peran pemangku kepentingan yang seharusnya dapat memfasilitasi pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi hal yang sangat penting. Namun, peran utama dalam pengelolaan ini tetap menjadi tanggungjawab masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat juga mendapatkan berbagai keuntungan dalam pengelolaan sampah ini karena masyarakat mampu mengurangi timbulan sampah, menjaga

kelestarian lingkungan, dan juga mendapatkan keuntungan dari pemilahan sampah yang ternyata bernilai ekonomis. Sistem pengelolaan sampah secara teknis yang berisi alur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan juga dibahas secara rinci oleh mitra penelitian yakni Satyarsa Wienuri. Pembahasan studi ini saling berkaitan antara satu dan lainnya karena strategi kelembagaan yang diusulkan juga sesuai dengan teknis operasional yang diharapkan kedepannya. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian terhadap perencanaan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini agar menjadi salah satu upaya penyelesaian masalah penumpukan sampah di Kecamatan Colomadu terutama dalam studi ini yang berfokus pada aspek kelembagaan dengan menentukan aktor-aktor yang terlibat, peran, dan hubungan dari aktor tersebut dalam pengelolaan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Penjabaran masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Colomadu secara umum telah dijelaskan pada bagian latar belakang. Masalah yang umumnya terjadi terkait pengelolaan sampah yakni akibat pengaruh jarak yang cukup jauh untuk menjangkau TPA Sukosari yang terdapat di Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Namun, masalah yang lebih spesifik yang akan dibahas dalam rumusan masalah ini adalah masalah kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Colomadu. Masalah kelembagaan yang saat ini terjadi yaitu kurang maksimalnya peran dan kinerja pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dianggap sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar. Namun, DKP tidak mungkin dapat bekerja sendiri dalam mengatur pengelolaan sampah. DKP bertugas untuk melakukan fungsi pengangkutan dan pemrosesan di akhir tetapi jumlah armada dan petugas yang dimiliki sangat terbatas. Selain itu, volume sampah yang dihasilkan masyarakat terus mengalami peningkatan, bahkan masyarakat belum melakukan pemilahan, dan membuang sampah masih dengan cara konvensional (dengan cara dibakar, ditimbun, dan dibuang ke sembarang tempat).

Terdapat lembaga lainnya yang juga terlibat dalam pengelolaan sampah di tingkat kabupaten yaitu Badan Lingkungan Hidup Bidang Pemulihan. BLH menganggap bahwa perannya dalam pengelolaan sampah hanya sebatas pada upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan sampah melalui pengadaan kegiatan bank sampah dan perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah melalui sosialisasi (3R). Tetapi, sosialisasi yang dilakukan tidak rutin dan pengadaan bank sampah tidak dilakukan secara merata ke seluruh wilayah bahkan juga tidak terdapat di Kecamatan Colomadu meskipun Kecamatan ini termasuk dalam salah satu prioritas lokasi pengangkutan sampah oleh DKP. Sehingga terlihat bahwa tahapan yang seharusnya dilakukan oleh BLH terlebih dahulu untuk mewujudkan masyarakat

yang paham terhadap pengelolaan sampah tidak berjalan dengan optimal dan akhirnya berimbas pada proses pengangkutan dan pemrosesan akhir yang ditanggungjawabkan kepada DKP menjadi beban yang semakin besar.

Peran lembaga lain yang belum maksimal yakni pemerintah kecamatan dan desa. Saat ini, Pemerintah Kecamatan Colomadu tidak memiliki bagian khusus yang menangani masalah terkait sistem persampahan. Menurut pemerintah kecamatan, pihaknya hanya mendapat laporan dari masyarakat yang mengeluh dan resah dengan sampah yang menumpuk kemudian ditindaklanjuti untuk dilaporkan ke DKP Karanganyar. Sehingga terlihat bahwa Peran Pemerintah kecamatan hanya sebatas menampung keluhan masyarakat. Sementara itu, Pemerintah Desa juga tidak memiliki peran strategis, padahal pemerintah desa merupakan lembaga yang paling bersinggungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa menganggap bahwa pihaknya juga tidak bisa menggerakkan masyarakat apabila tidak didorong bersama oleh pemerintah dengan tingkatan yang lebih tinggi dan lebih memahami pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan. Meskipun pemerintah desa mampu menyediakan lahan melalui kas desa dan adanya bantuan dana tetapi pengelolaan tersebut juga tidak bisa berjalan optimal jika tidak didukung oleh lembaga lainnya.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah merumuskan strategi kelembagaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Colomadu. Strategi kelembagaan sangat berkaitan dengan aktor-aktor yang terlibat dan peran aktor tersebut dalam pengelolaan sampah. Dalam mencapai tujuan maka dibutuhkan sasaran-sasaran yang lebih spesifik. Sasaran yang akan dilakukan dalam tugas ini terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap penelitian dan tahap perencanaan. Tahap penelitian adalah tahap pengumpulan data awal secara eksisting, sedangkan tahap kedua yaitu tahap perencanaan untuk menyusun preskripsi yang membutuhkan data terkait persepsi pemangku kepentingan terhadap konsep dan strategi yang akan diusulkan. Tahapan ini secara lebih rinci dijabarkan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat secara eksisting di Kecamatan Colomadu
- Merumuskan usulan konsep kelembagaan pengelolaan sampah di Kecamatan Colomadu melalui dasar konsep yang terdiri atas tinjauan teori, regulasi, dan praktek terbaik
- Mengidentifikasi persepsi pemangku kepentingan (masyarakat dan pemerintah) terhadap usulan konsep kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Colomadu

- Menganalisis hasil pengumpulan data persepsi pemangku kepentingan terhadap usulan konsep kelembagaan pengelolaan sampah berbasis di Kecamatan Colomadu
- Merumuskan tujuan perencanaan kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Colomadu di masa yang akan datang
- Merumuskan indikator, baseline, dan target yang akan dicapai pada kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Colomadu
- Merumuskan usulan strategi dan tindakan untuk mencapai target kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Colomadu
- Merumuskan kebutuhan sumber daya dan waktu pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Colomadu
- Menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk perencanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Colomadu di masa yang akan datang.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam tugas akhir ini berisi mengenai pemahaman terhadap batasan materi dan unit perencanaan. Pemahaman terhadap materi akan membahas mengenai sistem pengelolaan sampah eksisting yaitu kegiatan yang dilakukan sejak dari timbulan sampah hingga ke proses akhir dari sampah tersebut. Identifikasi dan analisis peran dari masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan sampah juga sangat penting untuk dipahami. Lembaga merupakan bagian terpenting dalam tugas akhir ini karena berfungsi sebagai pengatur (pembuat kebijakan) dan pelaksana yang berusaha untuk menjalankan segala aturan yang ditetapkan tersebut sesuai dengan sebagaimana mestinya. Lembaga dapat memiliki berbagai peran dan fungsi masing-masing sehingga pengoptimalan fungsi ini akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja kelembagaan yang terintegrasi secara menyeluruh. Kemudian usulan konsep pengelolaan sampah yang direncanakan adalah Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) yang sangat berkaitan erat dengan aktor serta perannya dalam pengelolaan sampah. PSBM akan menekankan peran utama masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkannya dalam lingkup rumah tangga agar mampu diolah secara mandiri.

Strategi yang dijabarkan dalam tugas akhir ini merupakan upaya mencapai tujuan pengelolaan sampah yang akan direncanakan. Strategi kelembagaan yang dituangkan berguna untuk meniadakan gap yang terjadi antara sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini dan di masa mendatang. Sehingga diharapkan melalui strategi ini segala tantangan yang dihadapi mampu diselesaikan dan berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Strategi ini kemudian akan lebih rinci dituliskan dalam rencana tindak dimana berisi hal-hal yang

seharusnya dilakukan menuju ke pencapaian tujuan yang didalamnya juga terdapat indikator ketercapaian agar secara kuantitatif perubahan yang terjadi dapat terukur.

Unit perencanaan dalam tugas akhir ini yaitu dimulai dari unit terkecil lingkup rumah tangga, RW, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Dalam lingkup tersebut akan dijabarkan masing-masing aktor yang terlibat dan perannya dalam proses pengelolaan sampah. Kecamatan Colomadu terdiri atas 11 Desa/Kelurahan yakni Desa Ngasem, Bolon, Malangjiwan, Gawan, Paulan, Gajahan, Gedongan, Tohudan, Blulukan, Klodran, Baturan. Desa-desanya ini kemudian akan dikelompokkan menjadi beberapa karakteristik dengan intervensi perencanaan yang berbeda pula, secara lebih jelas akan dijabarkan pada Bab IV. Perencanaan pengelolaan sampah dalam tugas akhir ini merupakan rencana jangka menengah dengan intervensi waktu selama 10 tahun. Penetapan jangka waktu ini berdasarkan pada kondisi pengelolaan sampah eksisting dan perubahan volume sampah yang akan terjadi di masa mendatang.

1.5 Manfaat Studi

Manfaat studi yang dilakukan yakni untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya rencana pengembangan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Karanganyar dengan lebih spesifik mengambil studi kasus di Kecamatan Colomadu. Rencana pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dikembangkan dalam studi ini juga mampu mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2032 mengenai rencana prasarana pengelolaan persampahan yang meliputi pelaksanaan program 3R dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari kebijakan tanpa menimbulkan pencemaran baik sejak sumber sampah, TPS, sampai dengan TPA, pengembangan sistem komposting, peningkatan swadaya masyarakat dalam mengelola sampah, pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemanfaatan kembali (daur ulang) sampah, serta meningkatkan kemampuan institusional dalam memberi sanksi bagi pencemar dan pemberlakuan secara ketat tentang baku mutu lingkungan.

Studi ini juga mampu memperlihatkan kondisi pengelolaan eksisting yang bermanfaat sebagai gambaran pengelolaan di Kecamatan Colomadu secara lebih jelas dan aktual. Selain itu, secara lebih spesifik manfaat akan sangat dirasakan oleh DKP selaku dinas yang bertanggungjawab dalam sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Karanganyar karena mendukung program kerja yang bertujuan untuk menciptakan Kecamatan Colomadu mampu mandiri dalam pengelolaan sampah. Berbagai upaya dilakukan oleh DKP Karanganyar untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya melalui sosialisasi yang dilakukan di beberapa desa yang berada di Kecamatan Colomadu. Sehingga studi ini akan berupaya untuk mendukung dan menjadi salah satu pedoman/dasar mekanisme pelaksanaan program yang diharapkan oleh DKP tersebut dengan secara lebih spesifik menjabarkan peran kelembagaan

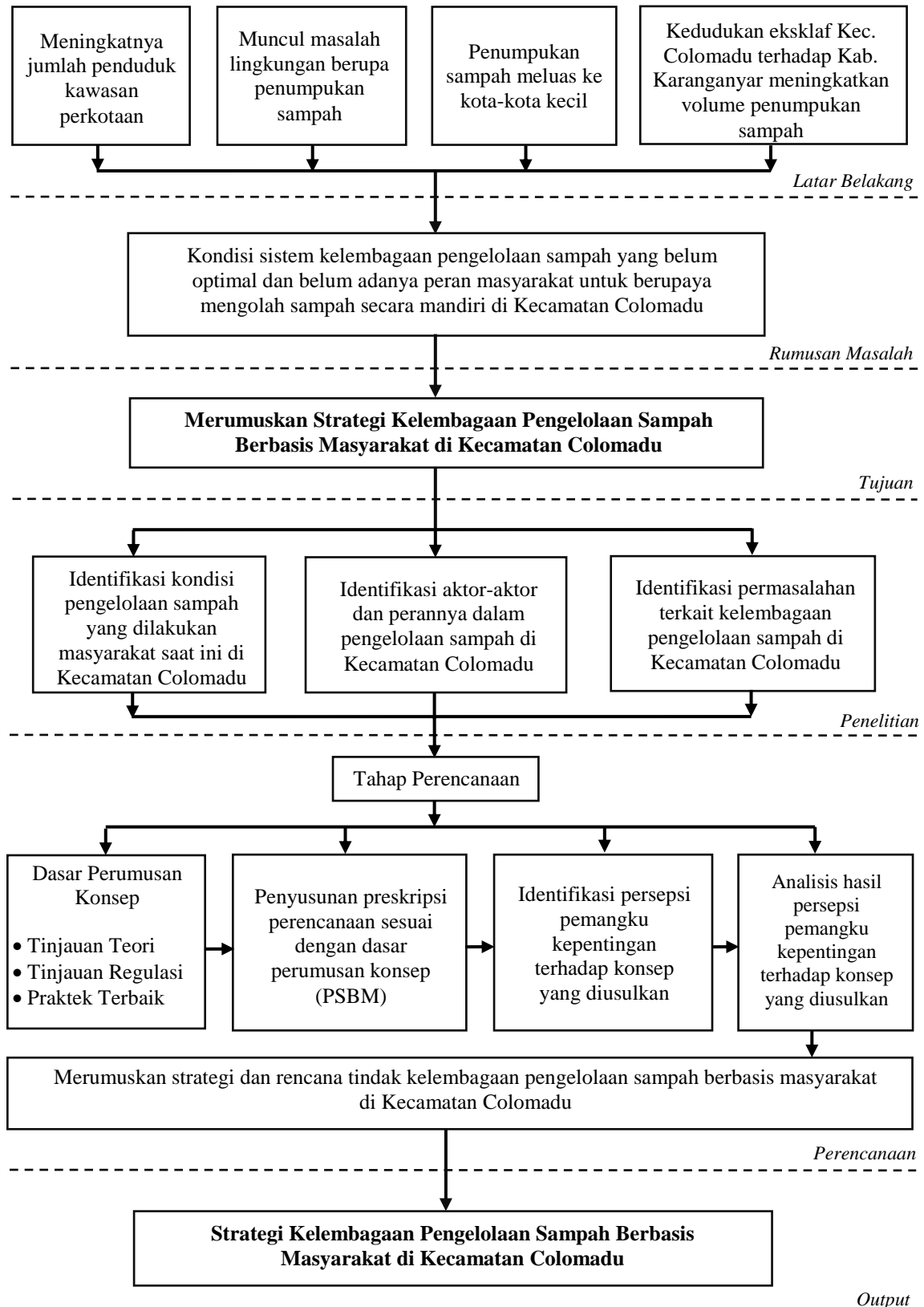
yang seharusnya dapat diwujudkan menuju pengelolaan sampah yang mandiri di Kecamatan Colomadu.

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam tugas akhir ini dijabarkan dalam bagan alur yang terbagi menjadi 3 tahapan yakni tahap input, proses, dan output (Lihat Gambar 1.2). Pada tahap input terdapat latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang berisi fenomena-fenomena yang terjadi dan menjadi salah satu dasar/pertimbangan untuk memilih kajian studi. Latar belakang studi ini yaitu karena semakin meningkatnya jumlah penduduk kawasan perkotaan. Peningkatan ini berdampak pada munculnya masalah-masalah lingkungan seperti masalah penumpukan sampah. Masalah penumpukan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun juga sudah meluas hingga ke kota-kota kecil. Uniknya, Kecamatan Colomadu juga memiliki masalah penumpukan sampah yang dipengaruhi dari peningkatan jumlah penduduknya dan juga akibat kedudukan eksklaf terhadap Kabupaten Karanganyar. Kedudukan eksklaf ini semakin memicu penumpukan sampah karena jarak yang cukup jauh dalam proses pengangkutannya.

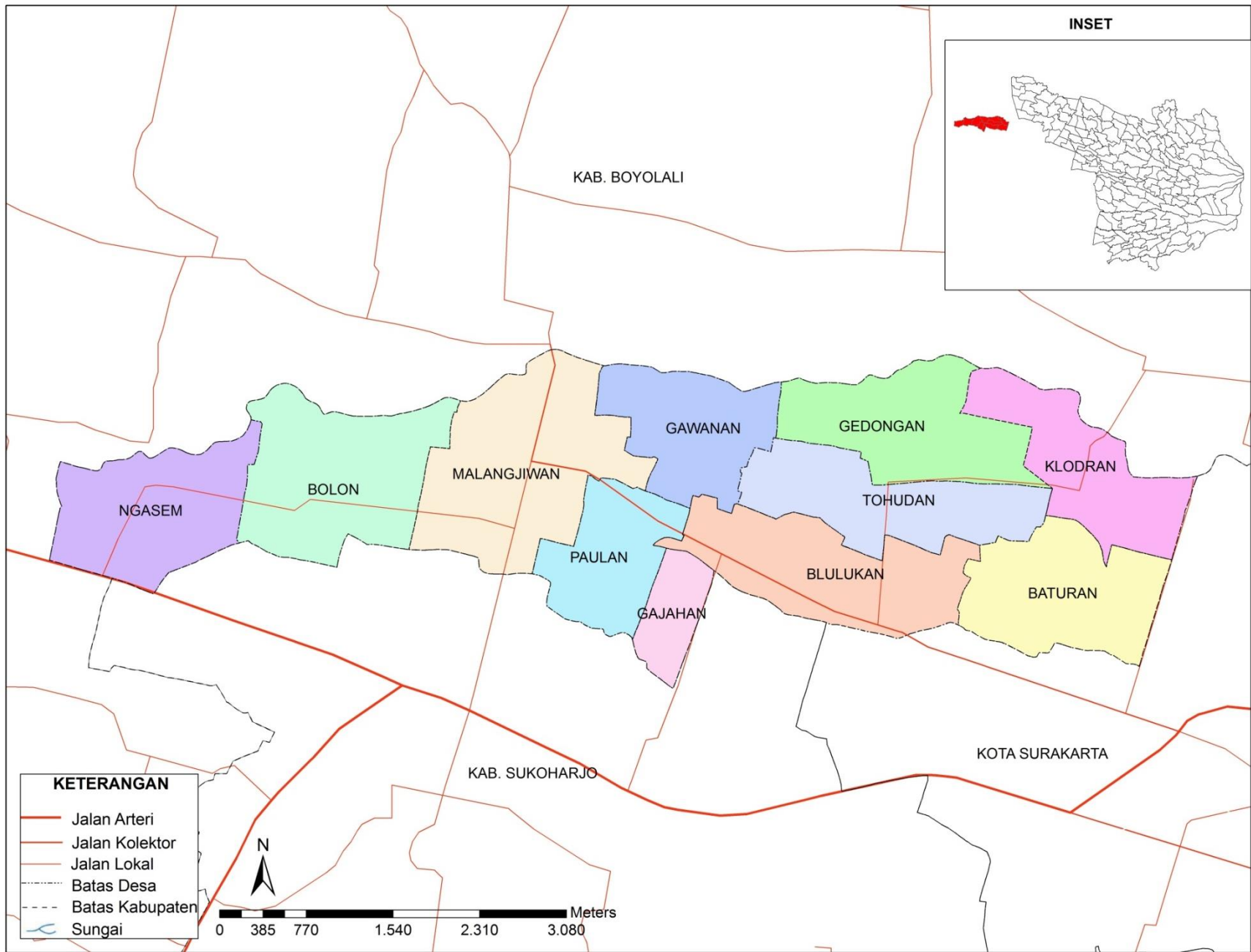
Rumusan masalah yang kemudian muncul akibat latar belakang tersebut secara lebih spesifik memperlihatkan masalah pada sistem kelembagaan. Masalah yang dihadapi yakni kurang optimalnya peran dan keterlibatan kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Colomadu. Selain itu, masyarakat juga belum berupaya melakukan pengelolaan sampah yang mandiri di lingkungannya. Bahkan masyarakat juga masih melakukan pengelolaan secara konvensional. Sehingga, tujuan dari studi ini adalah merumuskan strategi kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Colomadu.

Pada tahap proses terbagi menjadi dua yakni proses penelitian dan perencanaan. Proses penelitian berkaitan dengan pengumpulan data di lapangan yang kemudian akan menjadi fakta-fakta pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat saat ini di Kecamatan Colomadu. Dalam proses penelitian ini terdapat identifikasi sistem pengelolaan sampah saat ini, aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah, dan identifikasi masalah kelembagaan yang terjadi. Sedangkan pada tahap proses perencanaan, poin-poin yang dilakukan yakni dimulai dari perumusan dasar konsep, kemudian terdapat pengumpulan data kembali terkait dengan konsep yang diusulkan kepada pemangku kepentingan (masyarakat dan pemerintah), hasil dari pengumpulan tersebut dianalisis, selanjutnya dirumuskan strategi dan rencana tindak kelembagaan pengelolaan sampah. Sehingga output yang didapat yakni Strategi Kelembagaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Colomadu berisi rekomendasi untuk pengelolaan yang lebih berkelanjutan di masa yang akan datang. Kerangka pikir dijabarkan dalam bagan-bagan berikut ini.



Sumber: Analisis Penulis, 2016

Gambar 1. 1
Kerangka Pikir



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, 2013

Gambar 1. 2
Peta Administrasi

1.7 Metode Studi

Metode studi dalam tugas akhir ini terbagi menjadi dua yakni metode penelitian dan metode perencanaan. Metode penelitian merupakan metode pengumpulan fakta yang kemudian menjadi informasi mengenai kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kecamatan Colomadu. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, kuesioner, dan wawancara. Selanjutnya pada metode perencanaan dilakukan pengumpulan data terhadap konsep yang direncanakan dengan menggunakan teknik wawancara pada informan kunci (*key informan*) yang mengetahui permasalahan pengelolaan sampah secara lebih spesifik untuk mendapatkan gambaran pengelolaan sampah yang diharapkan kedepannya di Kecamatan Colomadu. Sehingga perencanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang akan direncanakan dalam tugas akhir ini memiliki landasan yang kuat yakni berdasar pada fakta-fakta yang didapatkan secara eksisting dan berisi pendapat/usulan dari masyarakat untuk pengelolaan sampah di masa yang akan datang. Metode penelitian dan perencanaan akan lebih jelas dijabarkan sebagai berikut.

Tabel I. 1
Tahap Metode Studi

No.	Metode Sudi	Teknik Pengumpulan Data	Sasaran/Responden	Tujuan Pengumpulan Data
1.	Metode Penelitian	Observasi	Titik penumpukan sampah di seluruh Desa/Kelurahan	Mengetahui fakta-fakta terkait pengelolaan dan penumpukan sampah secara eksisting di Kecamatan Colomadu.
		Kuesioner	100 sampel di seluruh Desa/Kelurahan	
		Wawancara	DKP dan masyarakat	
2.	Metode Perencanaan	Wawancara	Pemerintah dan Masyarakat	Mengetahui harapan / usulan pengelolaan sampah di masa yang akan datang dari pemangku kepentingan (informan kunci).

Sumber: Analisis Pribadi, 2016

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam suatu perencanaan. Hasil yang didapatkan pada tahap ini adalah karakteristik pengelolaan sampah di Kecamatan Colomadu pada saat ini. Kebutuhan data-data yang terdapat di wilayah studi pada saat ini akan menjadi dasar dalam mengintervensi perencanaan di masa yang akan datang. Dalam metode penelitian, hal-hal yang akan dijabarkan terdiri atas objek yang diteliti, jumlah populasi, jumlah sampel, data-data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, instrumen data, dan teknik analisis data.

Objek yang diteliti dalam studi ini adalah sistem pengelolaan sampah dan aktor-aktor yang berperan dalam setiap kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Colomadu. Dalam mengidentifikasi aktor dan perannya dalam pengelolaan sampah maka tidak terlepas dari adanya kegiatan pengelolaan sampah sehingga hal ini dapat diketahui secara bersamaan. Kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah yang dapat dilihat yaitu cara pengelolaan sampah masyarakat sejak dari lingkup rumah tangga (dikelola sendiri atau melalui pengangkutan oleh petugas), pengelolaan skala lebih lanjut yang pada umumnya dilakukan yaitu pembuangan menuju TPS hingga TPA. Sementara itu, aktor yang terlibat pada umumnya yakni masyarakat, petugas kebersihan yang ditunjuk oleh masyarakat, pemulung, serta pemerintah berupa dinas terkait. Hal-hal tersebut penting untuk diidentifikasi guna mengetahui sistem pengelolaan sampah eksisting dan permasalahan yang terjadi karena terlihat bahwa penumpukan sampah semakin meningkat di Kecamatan Colomadu.

Jumlah penduduk di Kecamatan Colomadu pada tahun 2013 sebesar 73.453 jiwa, sedangkan jumlah rumah tangga sebesar 19.547. Jumlah rumah tangga digunakan sebagai jumlah populasi dalam penelitian ini. Jumlah populasi akan menjadi dasar dalam penentuan ukuran sampel. Jumlah ukuran sampel memperlihatkan jumlah responden yang dibutuhkan untuk pengumpulan data penelitian pada 11 Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Colomadu. Perhitungan ukuran sampel ini dilakukan dengan menggunakan Rumus Slovin yakni:

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Populasi

e : Persentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan

Berikut ini terdapat perhitungan jumlah sampel/responden terpilih yang akan digunakan dalam studi, yaitu:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+(N \times e^2)} \\ &= \frac{19.547}{1+(19.547 \times 0,1^2)} \\ &= \frac{19.547}{195,57} \\ &= 99,94 \approx \mathbf{100 \text{ sampel}} \end{aligned}$$

Ukuran sampel yang didapat yaitu 100 sampel dalam lingkup Kecamatan Colomadu. Ukuran ini secara spesifik dapat dibagi menjadi tiap-tiap desa karena setiap Desa memiliki jumlah rumah tangga yang berbeda-beda sehingga juga akan berpengaruh pada sampel yang dibutuhkan. Pembagian sampel pada setiap desa dengan cara membagi jumlah total sampel yang didapatkan (100 sampel) sesuai dengan rumah tangga yang terdapat di masing-masing desa. Berikut ini merupakan jumlah sampel setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Colomadu.

Tabel I. 2
Jumlah Sampel Per Desa

No.	Desa	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Sampel Per Desa
1.	Ngasem	1547	8
2.	Bolon	2026	10
3.	Malangjiwan	3662	19
4.	Paulan	1232	6
5.	Gajahan	636	3
6.	Bulukan	1285	7
7.	Gawanan	1667	9
8.	Gedongan	2020	10
9.	Tohudan	1360	7
10.	Baturan	2636	13
11.	Klodran	1476	8
Total		19547	100

Sumber: Analisis Pribadi, 2016

Setelah mengetahui ukuran sampel yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan yakni penyusunan data penelitian. Data berfungsi sebagai dasar dalam mengetahui berbagai fakta dan temuan di wilayah studi. Penyusunan data ini dapat dijabarkan dalam tabel kebutuhan data. Kebutuhan data merupakan susunan data-data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan studi. Data-data yang diperlukan berkaitan dengan aktor-aktor pengelolaan sampah, peran, serta hubungan dari aktor-aktor tersebut. Tabel kebutuhan data terdiri atas aspek, nama data, unit data, tahun data, jenis data, bentuk data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan tujuan data. Aspek data terdiri atas aspek umum dan kelembagaan. Unit data terkecil yang didapat yakni dalam lingkup desa/kelurahan. Tahun data yang digunakan yakni data terbaru (tahun 2016). Jenis data terbagi menjadi data primer (didapatkan langsung di lapangan) dan data sekunder (melalui telaah dokumen). Bentuk data terbagi menjadi deskripsi, angka, dan gambar. Sumber data pada umumnya didapatkan secara langsung di lapangan dan data yang diperoleh dari instansi. Teknik pengumpulan yang digunakan yakni terbagi menjadi kuesioner, wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Tujuan data menjelaskan urgensi dari pengambilan data tersebut. Kebutuhan data dalam studi ini dijabarkan sebagai berikut:

Tabel I. 3
Kebutuhan Data

No	Aspek	Nama Data	Unit Data	Tahun Data	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Tujuan Data
1	Umum	Nama Responden	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Karakteristik Responden di Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
2	Umum	Umur Responden	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Karakteristik Responden di Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
3	Umum	Kontak Responden	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Karakteristik Responden di Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
4	Umum	Alamat Responden	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Karakteristik Responden di Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
5	Umum	Jumlah Anggota Keluarga Responden	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Karakteristik Responden di Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
6	Umum	Pekerjaan Responden	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Karakteristik Responden di Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
7	Umum	Pendapatan Responden	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Karakteristik Responden di Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
8	Umum	Lama Tinggal Responden	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Karakteristik Responden di Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
9	Kelembagaan	Jumlah Petugas Sampah	Desa/Kelurahan	2015	Sekunder	Angka	Instansi	Telaah Dokumen	Mengetahui Jumlah Petugas Sampah di Setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
10	Kelembagaan	Aktor yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Aktor yang Terlibat Dalam Pengelolaan Sampah di Setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu

No	Aspek	Nama Data	Unit Data	Tahun Data	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Tujuan Data
11	Kelembagaan	Besar Iuran Sampah	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Besar Iuran Sampah di Setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
12	Kelembagaan	Inisiatif Masyarakat Untuk Menanggulangi Sampah	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Kuesioner	Mengetahui Inisiatif Masyarakat Dalam Menanggulangi Sampah di Setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
13	Kelembagaan	Harapan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Wawancara	Mengetahui Harapan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
14	Kelembagaan	Persepsi Masyarakat Terhadap Strategi Kelembagaan	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Wawancara	Mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap Strategi Kelembagaan di Setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu
15	Kelembagaan	Peran Masyarakat & Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah	Desa/Kelurahan	2016	Primer	Deskripsi	Lapangan	Wawancara	Mengetahui Harapan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Setiap Desa/Kelurahan Kecamatan Colomadu

Sumber: Analisis Penulis, 2016

Setelah mengetahui data-data yang diperlukan, maka selanjutnya yang perlu disusun adalah teknik pengumpulan data tersebut. Teknik pengumpulan data pada metode penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Kuesioner dibutuhkan untuk mengumpulkan data-data dengan target atau sasarnya yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di setiap desa/kelurahan. Hasil dari kuesioner juga sangat penting karena dapat menunjukkan proses pengelolaan sampah yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat. Sehingga hal itu juga mendukung tahap perencanaan di masa yang akan datang. Sementara itu, teknik observasi digunakan untuk memperlihatkan gambaran penumpukan sampah yang terjadi di wilayah studi. Observasi dilakukan pada seluruh Desa/Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Colomadu dengan target utama yakni titik-titik penumpukan sampah seperti di TPS, lahan kosong, pinggir sawah, dan sungai. Observasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan gambar-gambar yang menunjukkan terjadinya penumpukan sampah. Gambar-gambar yang telah dikumpulkan ini dapat menjadi bukti pendukung dan fakta yang ditemukan di lapangan secara eksisting. Sehingga observasi bernilai sangat penting dalam mengetahui masalah penumpukan sampah di Kecamatan Colomadu. Tahap terakhir yakni wawancara yang dilakukan setelah melalui proses perizinan pada pihak birokrasi. Target wawancara dalam tahap penelitian ini yaitu dari pemerintah yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta masyarakat yang berperan sebagai petugas kebersihan di Kecamatan Colomadu. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan penumpukan dan sistem pengelolaan sampah saat ini yang diupayakan dari pihak pemerintah dan yang sedang dilaksanakan oleh petugas kebersihan. Instrumen data yang dibutuhkan berdasarkan teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi tiga, yaitu form kuesioner, wawancara, dan list lokasi observasi.

Teknik analisis data dilakukan setelah data didapatkan dan siap untuk diolah. Teknik analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menghitung hasil dari data-data yang didapat dari kuesioner. Statistik deskriptif adalah proses pengumpulan, penyajian, dan meringkas berbagai karakteristik dari data dalam upaya untuk menggambarkan data tersebut secara memadai (Santoso, 2003). Suatu proses atau upaya dalam membuat suatu data mentah menjadi lebih berarti adalah tujuan dari statistik deskriptif. Pengumpulan data yang telah dilakukan selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk tabel (hasil tabulasi) dan grafik (gambar atau bagan). Penggunaan analisis statistik deskriptif dalam tugas akhir ini berfungsi untuk mengolah data-data yang didapatkan dari hasil kuesioner. Selanjutnya data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk grafik maupun tabel dengan merepresentasikan jumlah dari setiap data yang didapat (distribusi frekuensi). Sehingga data-data yang ditampilkan secara lebih sederhana dan mudah dipahami.

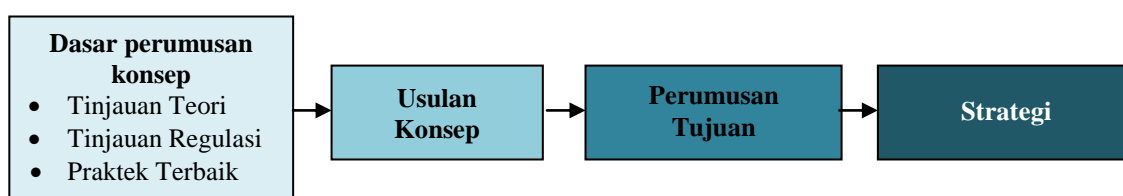
1.7.2 Metode Perencanaan

Metode perencanaan merupakan tahap kedua yang dilakukan dalam studi ini. Metode perencanaan bertujuan untuk mengklarifikasi hasil temuan yang didapatkan serta menggali informasi lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap strategi kelembagaan pengelolaan sampah di masa yang akan datang. Berbagai informasi yang didapatkan dari tahap penelitian menjadi dasar dalam penentuan strategi pengelolaan sampah di masa yang akan datang di Kecamatan Colomadu. Selanjutnya, dilakukan pembentukan konsep pengelolaan sampah yang berisi strategi kelembagaan yaitu memperlihatkan aktor-aktor yang terlibat dan perannya dalam pengelolaan sampah di masa yang akan datang. Pengumpulan data terkait konsep ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*deep interview*). Informan kunci yang menjadi sumber utama dalam perencanaan ini didapatkan dari hasil pertemuan atau sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan DKP Karanganyar di beberapa desa (Desa Gawan dan Bolon) yang bertepatan dengan jadwal pengambilan data. Pertemuan tersebut sangat bermanfaat karena peneliti dapat mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga memiliki tujuan yang sama dengan perencanaan yang disusun ini, kemudian peneliti dapat bertemu langsung dengan berbagai lapisan masyarakat yang peduli dan ikut andil dalam masalah pengelolaan sampah. Sehingga didapatkan beberapa informan kunci yang sangat mengetahui lebih mendalam mengenai pengelolaan sampah di desanya masing-masing. Sasaran wawancara yakni pemangku kepentingan yang terdiri atas masyarakat (petugas kebersihan) dan pemerintah (desa, kecamatan, DKP, dan BLH). Pendapat dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan inilah yang akan menjadi dasar dalam pembentukan strategi kelembagaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Colomadu.

Tahap awal yang perlu dilakukan dalam metode perencanaan ini yaitu identifikasi sistem pengelolaan sampah eksisting. Setelah dilakukannya identifikasi melalui hasil penelitian, maka akan didapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan seperti contohnya pada kegiatan pengolahan sampah yang konvensional (dibakar, ditimbun, dan dibuang ke sembarang tempat) serta permasalahan pada kelembagaan. Selanjutnya, dirumuskan konsep yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Konsep ini juga memiliki berbagai dasar pertimbangan yaitu tinjauan teori, regulasi, dan praktek terbaik (secara lebih rinci dijabarkan pada Bab III). Konsep pengelolaan sampah yang menjadi fokus utama dalam studi ini terkait dengan konsep kelembagaan. Penyusunan konsep tidak hanya selesai pada dasar pertimbangan dari tinjauan literatur, namun juga mempertimbangan pendapat dan harapan dari pemangku kepentingan di Kecamatan Colomadu. Pemangku kepentingan yang dimaksud ini terdiri dari masyarakat dan pemerintah (dinas yang berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah saat ini). Sehingga hal ini menjadi sangat penting karena peneliti akan kembali mengkonsultasikan konsep yang telah disusun

ini kepada pemangku kepentingan dengan tujuan untuk penyempurnaan konsep dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah.

Pada tahap selanjutnya, dilakukan penetapan tujuan. Tujuan menjadi sangat penting dalam perencanaan karena akan menunjukkan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang. Kondisi ini juga harus berkelanjutan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, maka dibutuhkan berbagai strategi yang mampu mewujudkan tujuan tersebut. Strategi ini disebut juga sebagai strategi kelembagaan pengelolaan sampah. Strategi juga akan berfungsi untuk menyelesaikan perbedaan/gap yang terjadi antara kondisi pengelolaan saat ini dan kondisi pengelolaan yang diharapkan kedepannya. Sehingga pada akhirnya akan muncul tindakan-tindakan yang dibutuhkan dengan secara lebih rinci dan jelas.



Sumber: Analisis Penulis, 2016

Gambar 1. 3
Proses Perumusan Strategi

Dalam proses perencanaan ini juga membutuhkan data-data yang berkaitan dengan tujuan perencanaan kedepannya. Data-data tersebut yaitu:

- Persepsi masyarakat (sampel sesuai karakteristik) terhadap konsep yang diusulkan
- Persepsi petugas kebersihan (eksisting) terhadap konsep yang diusulkan
- Persepsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap konsep yang diusulkan
- Persepsi Badan Lingkungan Hidup terhadap konsep yang diusulkan
- Persepsi pemerintah desa dan kecamatan terhadap konsep yang diusulkan

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada informan kunci (*key informan*) agar pendapat yang dibutuhkan dapat tersampaikan dengan jelas dan lebih rinci. Secara lebih jelas, kebutuhan data dan proses pengumpulannya akan dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel I. 4
Kebutuhan dan Proses Pengumpulan Data

No.	Kebutuhan Data	Proses Pengumpulan Data
1.	Persepsi masyarakat (sampel sesuai karakteristik) terhadap konsep yang diusulkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahap penelitian, telah didapat dan diketahui informan kunci yang berpotensi untuk ditemui kembali guna mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai konsep yang diusulkan

No.	Kebutuhan Data	Proses Pengumpulan Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan karakteristik dari 11 Desa/Kelurahan untuk mempermudah pengumpulan data karena dapat mewakili jumlah sampel sesuai karakteristik pengelolaan yang ditemukan pada tahap penelitian
2.	Persepsi petugas kebersihan (eksisting) terhadap konsep yang diusulkan	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas kebersihan ditemukan yang dapat menjadi narasumber yakni petugas yang bertempat tinggal di Kecamatan Colomadu dan biasanya melakukan pengangkutan sampah sehari-hari • Wawancara dilakukan pada beberapa petugas (sampel) sesuai karakteristik
3.	Persepsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap konsep yang diusulkan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mengenai usulan konsep dilakukan pada pertemuan kedua setelah mengetahui sistem pengelolaan sampah saat ini yang dilakukan pada tahap penelitian
4.	Persepsi Badan Lingkungan Hidup terhadap konsep yang diusulkan	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mengenai usulan konsep dilakukan pada pertemuan kedua setelah mengetahui sistem pengelolaan sampah saat ini yang dilakukan pada tahap penelitian
5.	Persepsi Pemerintah Desa dan Kecamatan terhadap konsep yang diusulkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kecamatan yang diwawancara yakni yang berkaitan dengan seksi lingkungan • Pemerintah Desa yang diwawancara yakni Kepala Desa atau perangkat yang mengetahui tentang sistem pengelolaan sampah. Jumlah informan menyesuaikan dengan hasil karakteristik

Sumber: Analisis Penulis, 2016

Hasil pengumpulan data ini kemudian dilakukan analisis. Teknik analisis data pada tahap perencanaan ini yaitu dengan melakukan triangulasi data yang ditemukan terutama hasil yang didapat dari wawancara, kuesioner, dan observasi di lapangan. Data hasil wawancara kemudian dibentuk menjadi transkrip dan dijabarkan melalui kutipan langsung dengan inti-inti dari pendapat/usulan berbagai informan yang mendukung pada usulan konsep. Hasil transkrip secara keseluruhan akan dilampirkan pada bagian lampiran. Selain hasil wawancara, dasar-dasar perumusan strategi lainnya didapatkan melalui kuesioner, observasi serta tinjauan regulasi yang berlaku karena terdapat berbagai regulasi yang sangat penting untuk menjadi dasar dalam perumusan kondisi ideal pengelolaan sampah di masa mendatang. Selain itu, terdapat pula pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat melalui pertemuan/sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DKP pada dua desa (Desa Gawan dan Bolon) di Kecamatan Colomadu. Sehingga pada tahap inilah peneliti dapat mengidentifikasi dan mengklarifikasi beberapa hal yang perlu menjadi usulan dan pertimbangan dalam strategi kelembagaan pengelolaan sampah di masa mendatang.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menggambarkan substansi yang akan dijabarkan dalam laporan ini. Laporan tugas akhir ini terdiri atas lima bagian yang disebut dengan bab. Setiap bab memiliki pembahasan dan substansi yang berbeda antara satu dan lainnya. Secara lebih jelas dijabarkan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai pendahuluan laporan di antaranya meliputi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, manfaat studi, kerangka pikir, metode studi, dan sistematika penulisan.

BAB II KONDISI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN COLOMADU

Berisi mengenai gambaran permasalahan yang terdapat di wilayah studi. Gambaran permasalahan terdiri atas gambaran kondisi fisik dan non fisik, pengelolaan sampah eksisting, permasalahan pengelolaan sampah, dan kebijakan pengelolaan sampah dari pihak DKP. Pada akhir bagian bab ini akan dijelaskan mengenai prediksi masalah kelembagaan pengelolaan sampah di masa mendatang dan tujuan perencanaan kelembagaan di Kecamatan Colomadu.

BAB III KONSEP KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN KARANGANYAR

Berisi mengenai berbagai literatur yang mendukung konsep yakni tinjauan teoritis, tinjauan regulasi, dan praktek terbaik pengelolaan sampah yang sudah dilakukan (*best practice*). Pada bagian akhir bab akan berisi pembahasan mengenai konsep sistem pengelolaan sampah dalam aspek kelembagaan yang terbagi menjadi dua yaitu konsep makro dan konsep mikro.

BAB IV STRATEGI KELEMBAGAAN PERSAMPAHAN

Strategi kelembagaan pengelolaan sampah ini berisi penjelasan mengenai strategi dan indikator yang ingin dicapai. Selain itu, penjabaran tersebut tersusun dalam beberapa tahapan pelaksanaan beserta sumber daya yang dibutuhkan (sumber daya manusia dan finansial).

BAB V REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Bab akhir yang berisi rekomendasi tindak lanjut untuk memperjelas hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam mencapai kelembagaan pengelolaan sampah yang mandiri dan terintegrasi di Kecamatan Colomadu pada masa yang akan datang.